



Kekuatan Partai Politik Islam di Pemilu 2024 (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB))

Risyah Aprimayanti¹

¹ Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia.



risyah.aprimayanti@lecture.unjani.ac.id

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received

22-February-2025

Revised

26-February-2025

Accepted

28-February-2025

This article discusses the Strength of Islamic Political Parties in the 2024 Election (Case Study of the National Awakening Party (PKB)). The method used in this research is qualitative with a descriptive case study type and tends to use analysis. Technical data collection using documentation studies from journals, the internet, books and other relevant sources. Based on the results of the analysis and discussion, it can be explained as follows. In the 2024 elections, PKB existence increased the most and received significant votes compared to the Islamic parties participating in the 2024 elections. The figure of the PKB party leader became one of the internal forces within the party, this became a party icon which became a force in attracting public attention in the elections. PKB strength to maintain its existence in the 2024 elections can be seen from two strategies, namely offensive and defensive.

Keywords: Election, Islamic Party, Partai Kebangkitan Bangsa.

Published by
Website



CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bais>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2025 (Risyah Aprimayanti)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokratis tidak terlepas dari kehadiran partai politik dan pemilihan umum. Partai politik sendiri merupakan salah satu pilar demokrasi. Makna penting hadirnya partai politik adalah sarana bagi ekspresi kepentingan masyarakat dalam asosiasi yang sedemikian luas. Sarana yang dapat dimainkan tidak hanya mewakili kepentingan partai itu sendiri, tapi mampu mewakili kepentingan masyarakat melalui wakil-wakilnya secara mayoritas (Labolo & Ilham, 2014). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Pembentukan partai politik tepatnya untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara mayoritas Muslim, kehadiran partai politik islam mewarnai perkembangan perpolitikan di Indonesia, terutama setelah reformasi yang memberikan harapan baru bagi umat Islam di Indonesia untuk terlibat dalam ruang-ruang politik (Hadiz 2011 dalam Nasuhaidi dan Dimas Subekti, 2024). Kebijakan politik setelah reformasi

memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan politik dan mempengaruhi peran umat Islam dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Hadirnya berbagai partai politik Islam di Indonesia menjadi bukti semangat umat Islam berperan aktif dalam politik dengan harapan mampu menjadi sarana untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Salah satu partai politik Islam di Indonesia yang sudah berdiri sejak lama dan sampai sekarang masih menunjukkan eksistensinya yaitu PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), terbentuknya partai politik ini atas banyaknya usulan yang masuk dari warga NU di seluruh pelosok tanah air (DPP PKB, 2018).

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser akibat desakan arus reformasi yang kuat. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU, usulan tersebut sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada juga yang mengusulkan nama parpol. Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah, bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama (DPP PKB, 2018).

Sejak berdirinya PKB, partai ini telah dipimpin tiga orang Ketua Umum yaitu Matori Abdul Djilil 1998–2001, Alwi Shihab 2001–2005, dan Muhaimin Iskandar 2005–sekarang. Tokoh sentral yang menjadi wajah PKB adalah Gus Dur. Beliau berhasil membawa PKB menjadi partai penguasa karena terpilih menjadi Presiden keempat Indonesia pada tahun 1999. Sejarah bangsa Indonesia mencatat, ketokohan dan kepemimpinan Gus Dur terbukti ampuh mendongkrak suara PKB di Pemilu 1999. Pesta demokrasi perdana yang diikuti *Green Party* ini sukses besar dengan meraup 13.336.982 suara (12,61 persen) setara 51 kursi di DPR RI. Tak hanya sampai di sana, gaya politik Gus Dur pun berhasil memikat koalisi poros tengah untuk menunjuk Gus Dur sebagai calon presiden. Melalui proses pemungutan suara pada Sidang Umum MPR, Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden RI dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. Pada Pemilu tahun 2004, PKB kembali masuk dalam lingkaran lima besar. Dimana peringkat PKB pada waktu itu berada di peringkat ketiga dengan raihan 12.002.885 suara (10,61 persen) dan mendapat 52 kursi DPR RI. Namun, pada Pemilu 2009 perolehan suara PKB melorot tajam. Partai anak kandung NU ini hanya meraih 5.146.302 suara (4,95 persen) dan mendapat 28 kursi DPR. Pada tahun 2014 perolehan suara PKB dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 kembali meroket dengan pencapaian 11.292.151 suara (9,04%) atau setara 47 kursi di DPR RI, dan pada tahun 2019 dengan perolehan suara 13.570.097 (9,69 persen), 58 kursi, peringkat ke 5 (DPP PKB).

Pada Pemilu Serentak tahun 2024 yang menggabungkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tersebut, PKB meraih suara sebanyak 16.115.655 atau 10,62

persen. Perolehan pada Pemilu 2024 ini, PKB naik sebanyak 0,93 persen dari Pemilu 2019 lalu yang meraih 13.570.097 atau 9.69 persen (DPP PKB). Pada pemilu tahun 2024, PKB mencatatkan empat keberhasilan besar. Pertama, PKB berhasil meraih 16.115.665 suara. Jumlah ini terbesar sejak keikutsertaan PKB dalam Pemilu 1999 hingga Pemilu 2019. Kedua, PKB berhasil meningkatkan kursi DPR RI dari 58 di Pemilu 2019 menjadi 68 di Pemilu 2024. Kenaikan kursi ini juga terjadi di DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga, PKB berhasil mengirimkan wakil pertama kali di DPR RI dari 16 daerah pemilihan (Dapil) di antaranya dari Dapil Sumatera Barat II, Sumatera Utara I, Banten I, DKI Jakarta I dan DKI Jakarta II, Jawa Barat I, Jawa Barat V, Jawa Barat VI, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan NTB I. Keempat, PKB berhasil menjalankan amanat Muktamar VI Bali untuk mengantarkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai kontestan Pemilu Presiden 2024. Masuknya Ketua Umum Muhaimin Iskandar terbukti menjadi pengungkit efektif (*coat tail effect*) bagi soliditas pengurus, kader, calon anggota legislatif, untuk bergerak menaikkan suara PKB dalam Pemilu 2024 (Muktamar PKB, Platform Perjuangan Politik PKB 2024-2029).

Meski pada tahun 2024 dihadapkan dinamika politik nasional yang terasa kuat dan persaingan ketat antar partai politik, PKB mampu menunjukkan eksistensinya. Di tahun 2024 pengaruh besar isi-isu nasional mempengaruhi keputusan pemilih dan PKB mampu mencatat keberhasilan dan unggul di antara partai politik Islam yang ikut bersaing dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Hal tersebut sejalan yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut tahun 2024 menandai babak penting sejarah demokrasi Indonesia. Politikus yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI itu menyoroti bagaimana peran PKB di kancah politik nasional sepanjang 2024. Sepanjang tahun 2024, PKB disebut telah memainkan peran strategis dalam pencatatan politik nasional. Sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia, kata Cucun, PKB memanfaatkan momentum tahun politik ini untuk memperkuat posisinya baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, untuk pusat maupun daerah (M Sholahadhin Azhar, www.metrotvnews.com, 2024).

Melihat latar belakang tersebut, tulisan ini akan menganalisa bagaimana kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa di era gempuran persaingan banyak partai dan isu-isu nasional hingga mampu mempertahankan eksistensinya pada Pemilu tahun 2024. Oleh karena itu yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah fokus membahas pola kekuatan partai politik Islam PKB dalam pemilu tahun 2024 yang ditinjau dari segi figur kepemimpinan dalam partai dan strategi partai politik PKB untuk memperkuat eksistensinya di ajang Pemilu tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan tipe studi kasus yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dengan cara ini, penulis mengumpulkan informasi yang telah ada dalam literatur. Dalam pengumpulan data menggunakan metode *library research* berupa buku, jurnal, artikel, dan media daring yang memiliki kredibilitas seperti CNN Indonesia, metrotvnews.com, nasional.sindonews.com, dan news.detik.com serta sumber lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Politik Islam di Indonesia

Kemunculan partai politik di Indonesia tak terlepas dari terciptanya iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat. Kebebasan tersebut memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk dalam membentuk partai politik. Beberapa ahli menyatakan pendapat tentang partai politik diantaranya:

- a. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
- b. Sigmund Neumann dalam *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: *a political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of government power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views* (Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda) (Sigmund Neumann dalam Labolo & Ilham, 2014).

Di Indonesia setelah adanya reformasi telah membuka kesempatan akan keberadaan partai politik melalui pendiriannya. Berbagai motif pendirian partai politik mendasari kehadiran partai-partai baru antara lain: (1) motif kekuasaan, (2) motif ekonomi, (3) motif kekuasaan pragmati, (4) Transaksional, (5) Bargaining Position. Kondisi ini menyebabkan partai tidak lebih sebagai *event organizer* dari orang-orang yang mengharapkan kekuasaan (Efriza, *Political Explore*: 2012). Kehadiran partai politik di Indonesia memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam demokrasi. Dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik hal ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Sebagai negara mayoritas Muslim adanya partai politik membuka ruang yang luas untuk umat Islam di Indonesia terlibat dalam aktivitas partai politik yang secara historis telah mewarnai perkembangan negara Indonesia. Agama telah ditetapkan sebagai salah satu variabel penting yang turut menentukan warga negara dalam sebuah panggung politik (Jung 2014 dalam Nasuhaidi dan Dimas Subekti, 2024). Partai-partai politik Islam selalu berpartisipasi dalam pemilu-pemilu yang diselenggarakan di Indonesia. Pada pemilu 1999, terdapat 9 partai politik Islam, pada pemilu 2004 dan 2009 terdapat 6 partai politik Islam berpartisipasi. Pada Pemilu 2014 dan 2019 terdapat 5 partai politik Islam berpartisipasi, dan pada Pemilu 2019, hanya ada 4 partai politik (KPU RI 2023). Sementara pada tahun 2024, partai islam yang lolos sebagai peserta pemilu 2024 terdapat 5 partai, diantaranya PKB, PPP, PKS, PBB, dan Partai Gelora yang merupakan pendaatang baru (nasional.sindonews.com). Di antara partai islam tersebut, pada pemilu tahun 2024 eksistensi PKB paling meningkat dan memperoleh suara yang signifikan dibandingkan partai islam yang berpartisipasi pada Pemilu tahun 2024. Salah satu yang menjadi sorotan, Ketua PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang sempat menjadi cawapres, kini duduk di

kabinet dan menunjukkan pengaruh PKB dalam perpolitikan di Indonesia.

Kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu Tahun 2024.

1. Kekuatan PKB Pada Pemilu Tahun 2024 Ditinjau dari Figur Kepemimpinan dalam Partai

Kepemimpinan politik merupakan fenomena yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai konteks politik. Kepemimpinan politik terutama dalam partai politik tidak hanya berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan partai politik, tetapi juga berpengaruh terhadap individu atau kelompok dalam mencapai visi misi partai yang sudah ditentukan. Menurut (Fahmi, 2012) menyatakan kepemimpinan politik adalah sebuah keahlian yang berfungsi dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang lain kepada pencapaian tujuan. Sedangkan (Pasalong, 2008) mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan politik dapat tinjau dari:

- a. Fungsi perintah yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya.
- b. Fungsi konsultatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, meskipun pelaksanaan sangat tergantung pada pihak pemimpin.
- c. Fungsi partisipatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan yang dipimpin.
- d. Fungsi delegasi, yaitu fungsi pemimpin untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat, menetapkan, dan atau melaksanakan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pimpinan.

Berdasarkan fungsi kepemimpinan politik tersebut dapat dianalisa bahwa figur pemimpin partai PKB menjadi salah satu kekuatan internal dalam partai. Pemimpin partai merupakan identitas tokoh partai yang menjadi sorotan masyarakat yang harus mencerminkan kemampuan memimpin dan merangkul lapisan masyarakat. Fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya harus digerakkan oleh figur yang mampu membawa banyak pengaruh kepada anggotanya untuk mendukung keberlangsungan partai. Seiring perkembangannya, PKB telah beberapa kali berganti Ketua Umum Partai, hal tersebut berdampak pada eksistensi partai dalam setiap keterlibatannya pada Pemilu. Pada tahun 2024, PKB menjadi partai politik yang memperoleh suara yang signifikan, hal ini tentu tidak terlepas dari figur partai yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti yang dikutip dalam wawancara CNN Indonesia,¹ oleh Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan, salah satu bukti keberhasilan PKB adalah meraih suara signifikan di daerah-daerah seperti Provinsi NTT dan Kabupaten Samsir, yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Dengan kombinasi peran eksekutif dan legislatif yang kuat, PKB semakin mempertegas posisi sebagai salah satu partai politik yang paling berpengaruh di Indonesia.

Di samping perolehan suara yang signifikan pada Pemilu 2024, PKB sempat menghadapi sejumlah rintangan yang berpotensi memecah belah partai. Potensi

¹ Wawancara dikutip dari CNN Indonesia oleh Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal pada link: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241231091201-32-1182498/pkb-pamer-kekuatan-2024-suara-pileg-naik-menang-di-wilayah-non-muslim>

perpecahan yang paling besar berasal dari gonjang-ganjing muktamar tandingan untuk mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. Adanya masalah tersebut jika ditinjau dari fungsi pemimpin konsultatif yaitu bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, meskipun pelaksanaannya tetap tergantung pada pihak pemimpin. Dihadapkan permasalahan internal partai, Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal dengan Cak Imin atau Gus Muhaimin sebagai Ketua Umum Partai, di bawah kepemimpinannya, PKB berhasil mengelola konflik ini dengan baik hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Gus Muhaimin mampu mengeliminasi intervensi pihak eksternal yang berusaha mempengaruhi arah kebijakan partai (CNN Indonesia, 2024).

Sebagai partai yang berakar dari tradisi Islam moderat, PKB dinilai banyak kalangan sebagai penyeimbang dalam dinamika politik identitas di Indonesia. Keberadaan partai ini penting untuk memperkuat semangat keberagaman dan pluralisme di Indonesia. PKB memperjuangkan nilai-nilai Islam moderat dan toleran, yang menjadi karakteristik mayoritas umat Islam di Indonesia. Kehadiran partai ini penting untuk menyeimbangkan arus pemikiran politik Islam di Indonesia. Sebagai partai yang berakar dari NU, PKB memegang teguh komitmen terhadap Pancasila, NKRI, demokrasi, multikultural, dan pluralisme di Indonesia. Untuk itulah, PKB bisa menjadi inisiator bagi partai Islam lain untuk menjadi garda terdepan menjaga multikulturalisme di Indonesia.

Secara partisipatif dan delegasi, kepemimpinan PKB dalam pelaksanaannya dilakukan secara efektif antara pemimpin dan yang dipimpin. Hal ini tercermin melalui forum yang diselenggarakan seperti Muktamar yang merujuk kepada pertemuan besar para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Pada Forum Muktamar 2024 yang diselenggarakan di Bali secara aklamasi memilih kembali Gus Muhaimin sebagai Ketua Dewan Tanfidz PKB. Keberhasilan itu tidak hanya menegaskan soliditas internal PKB, tetapi juga menunjukkan bahwa Gus Muhaimin memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari mayoritas Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC). Dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, Gus Muhaimin mampu mengeliminasi intervensi pihak eksternal yang berusaha memengaruhi arah kebijakan partai. Keberhasilan tersebut dinilai juga telah menegaskan bahwa PKB semakin dipercaya sebagai partai yang inklusif dan mampu merepresentasikan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Cucun meyakini PKB semakin diterima oleh kaum urban dan generasi muda, yang juga dapat dimaknai bahwa partai berlambang bola dunia itu mampu beradaptasi dengan perubahan demografi politik (Cucun A Syamsurijal, Fraksi PKB, 2024).

Kekuatan PKB ditinjau dari kepemimpinan partai menunjukkan pemimpin partai memegang peran yang strategis, hal ini tidak hanya menjawab tantangan secara eksternal seperti dinamika politik di Indonesia, tapi juga mampu menyelesaikan masalah internal yang akan berdampak pada eksistensi PKB dalam Pemilu dan posisinya dalam perpolitikan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pemimpin PKB telah mampu menjadi figur yang secara keseluruhan menjalankan fungsi-fungsinya, baik secara perintah, konsultatif, partisipatif, dan delegasi.

2. Kekuatan PKB Pada Pemilu Tahun 2024 Ditinjau Dari Strategi Partai Politik PKB

Strategi politik yang digunakan dalam ranah politik meliputi *political branding*,

ketokohan isu politik, maupun marketing politik. Peter Schroder menjelaskan mengenai strategi politik yang didefinisikan sebagai strategi yang digunakan untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita, bahwa cita-cita tersebut bertujuan untuk memperoleh kekuasaan. Berikut merupakan jenis-jenis strategi politik menurut Peter Schoder; 1) Strategi ofensif (menyerang) biasanya digunakan oleh partai apabila menginginkan peningkatan dalam jumlah pemilihnya. 2) Strategi Defensif yaitu apabila partai ingin mempertahankan dominasinya atau mempertahankan pangsa pasar agar tetap eksis dan tidak berkurang pengaruhnya, bisa juga dikatakan bahwa strategi defensif adalah strategi yang digunakan untuk mempertahankan pasar, menutup, atau menyerahkan pasar (Peter Schroder, 2013).

Kekuatan PKB pada Pemilu tahun 2024 ditinjau dari strategi ofensif dilakukan dengan merekrut tokoh-tokoh muda, di antaranya Ketua Harian DPP PKB dijabat sosok gen Z bernama Ais Shafiyah Asfar, kandidat doktor dari Universitas Airlangga yang baru berusia 23 tahun. Sederet tokoh muda menjabat Wakil Ketua Harian. Pada kasus PKB, penyegaran pengurus membuat eksistensi partai tetap bertahan dari ancaman luar. Namun, belum teruji mendongkrak peringkat elektoral. Tambahan suara PKB pada Pemilu 2024 (10,62 persen) dibanding pemilu sebelumnya (9,69 persen) lebih disebabkan efek dari pasangan capres/cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (news.detik.com, 2024).

Sementara Strategi Defensif yang dilakukan PKB untuk mempertahankan dominasinya atau mempertahankan pangsa pasar agar tetap eksis dan tidak berkurang pengaruhnya, pada pemilu 2024, pertama PKB sangat identik dengan NU yang mempunyai basis massa sangat besar, kedua PKB mempunyai Jawa Timur sebagai basis tradisional yang seringkali menjadi penentu kemenangan dalam Pilpres. Hal ini menjadi kekuatan PKB untuk mempertahankan dominasinya agar tetap eksis. Namun, meski mempunyai keunggulan PKB dihadapkan beberapa tantangan yang membutuhkan solusi kongkret. Di antaranya belum meratanya perolehan suara PKB terutama di daerah-daerah pemilihan di luar Jawa, masih lekatnya persepsi PKB sebagai partai agama, hingga minimnya tingkat keterkenalan PKB di kalangan anak muda. Strategi PKB di antaranya menghadapi tantangan tersebut adalah, dengan menghadirkan para pakar dan akademisi dalam memberikan masukan konstruktif terkait apa yang harus dilakukan oleh struktur PKB dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Kekuatan PKB baik dilakukan berdasarkan strategi ofensif maupun defensif harus terus meluaskan jaringan partai untuk memperkuat eksistensi partai dan memperkuat peran yang hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga memperoleh peningkatan kepercayaan masyarakat kepada PKB.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, sebagai negara mayoritas Muslim adanya partai politik membuka ruang yang luas untuk umat Islam di Indonesia. Pada pemilu tahun 2024 eksistensi PKB paling meningkat dan memperoleh suara yang signifikan dibandingkan partai Islam yang berpartisipasi pada Pemilu tahun 2024. Figur pemimpin partai PKB menjadi salah satu kekuatan internal dalam partai, hal ini menjadi ikon partai dalam menarik perhatian masyarakat pada saat Pemilu. Kekuatan PKB untuk mempertahankan eksistensinya pada Pemilu 2024 terlihat

dari dua strategi, yaitu ofensif dan defensif. Strategi ofensif dengan merekrut tokoh-tokoh muda yang masuk ke dalam jabatan Wakil Ketua Harian. Strategi secara defensif, kekuatan PKB didukung basis massa yang sangat besar dimana PKB sangat identik dengan NU.

REFERENSI

- CNN Indonesia, PKB Pamer Kekuatan 2024 Suara Pileg Naik Menang di Wilayah Non Muslim. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241231091201-32-1182498/pkb-pamer-kekuatan-2024-suara-pileg-naik-menang-di-wilayah-non-muslim>
- DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Sejarah Pendirian. <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>
- Dr. Muhadum Labolo, Teguh Ilham, S.Stp. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, I. (2012). Manajemen kepemimpinan: Teori dan aplikasi. Bandung: Alfabeta
- Fraksi PKB. (2024). Diakses melalui <https://www.fraksipkb.com/2024/12/31/catatan-akhir-tahun-cucun-a-syamsurijal-keberhasilan-dan-soliditas-pkb-di-panggung-politik-nasional-2024/>
- Lutfan Faizi. Partai Islam yang Lolos sebagai Peserta Pemilu 2024, Nomor Terakhir Pendaftar Baru. <https://nasional.sindonews.com/read/970979/12/party-islam-yang-lolos-sebagai-peserta-pemilu-2024-nomor-terakhir-pendaftar-baru-1671174749?showpage=all>
- M. Nur Rofiq Addiansyah, Ita Setyana. Strategi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Mendongkrak Perolehan Suara Pemilu 2019 di Kabupaten Pati. *Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah, Indonesia: POLITEA Jurnal Politik Islam*, ISSN: 2621-0312.
- M Sholahadhin Azhar. PKB Dinilai Mampu Lalui 2024 dengan Berhasil dan Solid. <https://www.metrotvnews.com/read/Kv|CaZvR-pkb-dinilai-mampu-lalui-2024-dengan-berhasil-dan-solid>
- Muhammad Maulana Nazril, Muhammad Faishal Fadhlurrahman, Lingga Abi Rahman, Surya Sukti. (2024). Sukses Kepemimpinan Politik Di Negara Demokrasi: Mekanisme, Tantangan, Dan Implikasinya. IAIN Palangka Raya. *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol.1, No.3 Juli 2024*.
- Nasuhaidi, Dimas Subekti. (2024). Pola Kekuatan Partai Politik Islam Indonesia Dalam Pemilu Di Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 8 Nomor 1 (2024) 82 – 94*.
- Platform Perjuangan Politik PKB 2024-2029. (2024). "Politik Rahmatan Lil 'Alamin - PKB Peduli Melayani untuk Solusi Bangsa".
- Pasalong, H. (2008). Kepimpinan birokrasi. Bandung: Alfabeta.
- Peter Schroder, Strategi Politik, terj. Aviantie Agoesman (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2013).
- Diakses melalui <http://repository.iainkudus.ac.id/>.
- Sapto Waluyo. Strategi Rejuvenasi PKB. <https://news.detik.com/kolom/d-7568319/strategi-rejuvenasi-pkb>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.

Diakses melalui, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011>.